

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Sektor Publik**

##### **1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Dari definisi diatas yang dimaksud dengan dana masyarakat merupakan dana yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan dikelola oleh individu tetapi dana yang dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan erat dengan perlakuan dan penerapan akuntansi pada wilayah publik.

Menurut Bastian pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta.<sup>9</sup>

Menurut Mardiasmo mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen

---

<sup>9</sup> Indra Bastian, SE. Akt., M.B.A., Ph.D., *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006) h.15

maupun alat informasi bagi publik.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Hafiz Akuntansi Sektor Publik merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta pengikhtisaran dengan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter, dan kejadian kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada asas otonomi serta tugas pembantuan yang didasarkan pada prinsip otonomi pada prinsip dan sistem NKRI.<sup>11</sup>

Menurut pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan usaha terutama yang bersifat keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

## 2. Tujuan akuntansi sektor publik

*American Accounting Association* dalam *Glynn* menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini

---

<sup>10</sup> Imam Mulyono, Kartika Dewi SS, R Setiawan, Sumiadji, Padma Andriana, Pelatihan Bidang Akuntansi Sektor Publik Kepada Guru SMK Jurusan Akuntansi di Kab. Lumajang, *Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 Maret 2020:141

<sup>11</sup> Sarwenda Biduri, SE.,M.SA, *Akuntansi sektor publik* (Sidoarjo: UMISDA Press,2018) hlm. 2

terkait dengan pengendalian manajemen (management control).<sup>12</sup>

- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

### 3. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dan karakteristik Akuntansi Sektor publik:

#### 1. Faktor Ekonomi

---

<sup>12</sup> Dewi, SE.,M.Si, *Akuntansi Sektor Publik* (Bali:CV. Noah Alentheia,2020) hal. 4

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a) Pertumbuhan ekonomi
- b) Tingkat inflasi
- c) Pertumbuhan pendapatan per kapita
- d) Struktur Produksi
- e) Tenaga Kerja
- f) Arus Modal dalam negeri
- g) Cadangan Devisa
- h) Nilai Tukar Mata Uang
- i) Utang dan Bantuan Luar Negeri
- j) Infrastruktur
- k) Teknologi
- l) Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
- m) Sektor Informal

## 2. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain:

- a) Hubungan negara dan masyarakat
- b) Legitimasi pemerintah
- c) Tipe rezim yang berkuasa
- d) Ideologi negara
- e) Elit dan politik masa
- f) Jaringan internasional<sup>13</sup>
- g) Kelembagaan

### 3. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a) Keragaman suku,ras, agama, bahasa dan budaya
- b) Sistem nilai di masyarakat
- c) Karakteristik masyarakat

### 4. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a) Pertumbuhan penduduk

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, MBA., Ak., CA., *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI, 2018) hlm. 3-5

- b) Migrasi
- c) Tingkat Kesehatan

#### 4. Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Sublik

Jenis Akuntansi sektor publik dibagi menjadi 6 bagian yaitu Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Parpol dan LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan, dan Akuntansi Tempat Peribadatan. Berikut adalah penjelasan dari enam jenis akuntansi sektor publik:

##### 1. Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.<sup>14</sup>

##### 2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan

---

<sup>14</sup> Yuesti, SE., MM, *Akuntansi Sektor Publik*, Bali:CV. Noah Aletheia, 2020:8

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya.

### 3. Akuntansi Parpol dan LSM

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan LSM mengacu pada PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba seperti halnya pada Akuntansi Partai Politik. LSM menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Pembukuan keuangan LSM diperiksa oleh peninjau organisasi dan pemberi dana.

Sementara itu, kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan LSM diselenggarakan oleh pelaku organisasi LSM ditentukan oleh badan penyanggah dana berdasarkan status LSM yang dimaksud. Rencana anggaran LSM, setelah disepakati oleh personil LSM, diusulkan kepada lembaga donor untuk disetujui menjadi sebuah

program atau proyek LSM.

#### 4. Akuntansi Yayasan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan.

#### 5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan

Akuntansi ini juga meliputi pengolahan data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga-lembaga pendidikan. Fungsinya adalah untuk pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan agar kegiatan operasional dan aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Akuntansi Kesehatan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipindahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana.

#### 6. Akuntansi Tempat Peribadatan

Akuntansi tempat peribadatan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya tempat peribadatan. Pencatatan dilakukan

sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

## **B. SAK-ETAP**

### **1. SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengacu pada *The International financial Reporting Standart for Small and Medium- Sized Entitas* (IFRS for SMEs). Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP digunakan bagi perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP disebutkan pada paragraf 3.12 yaitu terdiri dari :

- a) Neraca
- b) Laporan laba rugi
- c) Laporan perubahan ekuitas

- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan<sup>15</sup>

## 2. Laporan Keuangan SAK ETAP

Penjelasan dari Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pos-pos yang terdapat di dalamnya antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

### b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan

---

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009) hal. 18

beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.<sup>16</sup>

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos : pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapat dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

#### c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

##### 1) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan

---

<sup>16</sup> Yohanes Juan Huvat, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari di Samarinda, *Jurnal Ekonomia*, Vol. 6 No. 1, 2017:9-23

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut.

## 2) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

## d. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

### 1) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan

mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

## 2) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas

Investasi dan Pendanaan Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

## 3. Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi

Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas

koperasi disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement).

Dan dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK27.

### **C. Laporan Keuangan**

#### **1. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu laporan hasil pencatatan akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli sangat

bermacam-macam. Berikut ini adalah definisi-definisi laporan keuangan yang dipaparkan oleh para ahli.

Menurut Munawir pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) laporan keuangan adalah struktural yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas.

Menurut Sofyan S. Harahap laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Zaki Baridwan Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya

---

<sup>17</sup> Helmi Herawati, Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Akuntansi Unihaz*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, h. 16

<sup>18</sup> Asmara Jaya, Laporan Keuangan merupakan alat dalam memprediksi kecenderungan terjadinya kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model altman (Study Analisis), *Jurnal Akuntansi*, Vol. XVIII No. 02, Mei 2014:175

<sup>19</sup> Riswan, Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor, *Jurnal Akuntansi & keuangan*, Vol. 5 No. 1, Maret 2014:94

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: laporan arus kas (dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang dilakukan pada periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan lain-lain.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

## 3. Sifat Laporan Keuangan

Berikut ini adalah penjelasan dari sifat laporan keuangan antara lain:

### a. Bersifat historis

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun kebelakang (periode sebelumnya).

b. Bersifat menyeluruh

Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.<sup>20</sup>

4. Posisi Keuangan

Bab dua pada SAK ETAP dijelaskan bahwa posisi keuangan suatu entitasterdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan memperoleh entitas.
- b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar darisumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

5. Laporan Keuangan Koperasi

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008:12

Laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu koperasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut.

Laporan keuangan koperasi terdiri dari :

- a. Neraca yaitu laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah asset yang dimiliki, jumlah liabilitas, dan ekuitas koperasi pada suatu periode akuntansi.
- b. Perhitungan Hasil Usaha yaitu laporan yang menginformasikan hasil usaha koperasi dalam suatu periode akuntansi.
- c. Laporan arus kas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- d. Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
- e. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan koperasi.

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Karakteristik laporan keuangan koperasi adalah:

- a. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
- b. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari system operasi pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
- c. Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.
- d. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti:
  - a) Menilai pertanggungjawaban pengurus
  - b) Menilai prestasi kerja pengurus
  - c) Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada

anggotanya.

- d) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
- e. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHU nya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri.
- f. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.
- g. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri.

## 6. Tujuan pelaporan keuangan koperasi

Menurut Sitio dan Halomoan, laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk:

- a) Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
- b) Mengetahui prestasi keuangan selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
- c) Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih selama satu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.

Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.<sup>21</sup>

### **D. Rapat Anggota Tahunan**

#### 1. Pengertian Rapat Anggota Tahunan

Menurut Undang Undang Pasal 22 Nomer 25 Tahun 1992 Rapat anggota Tahunan adalah organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas yang pelaksanaannya

---

<sup>21</sup> Yulinartati, Penerapan SAK-ETAP pada Entitas Koperasi (Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember), *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol XII No.1/2013, Hal. 89

diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>22</sup>

Pemkop Nomor 19 tahun 2015 menjelaskan Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>23</sup>

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan Pengertian Rapat anggota Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh para anggota, pengurus dan pengawas, dimana rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang membahas segala persoalan yang meliputi bidang organisasi, usaha, permodalan, administrasi dan keuangan.

## 2. Tujuan Rapat Anggota Tahunan

Tujuan Rapat Anggota Tahunan menurut Permen KUKM No. 19 Tahun 2015 antara lain adalah:

- a. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha serta keuangan koperasi
- b. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab VI bagian kedua Rapat Anggota ,Pasal 22 Ayat 1 dan 2

<sup>23</sup> Zulfikli, Tinjauan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi di Kalimantan Timur Tahun 2017, *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2, Nov. 2019: 2

pengawas dalam pelaksanaan tugasnya

g. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha

### 3. Jenis Rapat Anggota Tahunan

a. Rapat anggota tahunan

Dilaksanakan setiap tahun dengan pembahasan mengenai rencana kedepan koperasi, mengenai keuangan koperasi, laporan koperasi selama satu tahun

b. Rapat anggota tahunan luar biasa

Dilaksanakan apabila koperasi ingin melakukan perubahan anggaran dasar, tempat alamat kedudukan koperasi dan lain lain , dan rapat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kourum rapat tersebut.<sup>24</sup>

## E. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris “co” dan “operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan kata lain koperasi ini memiliki artian kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki kepentingan serta tujuan yang sejalan.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinifikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan

---

<sup>24</sup> Pramono, Penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara Elektronik di tinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, *Jurnal Hukum Kenotarisan*, Vol. 2 No. 1, Jan 2020:89

ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buatbersama dan semua buat seorang.

Menurut Sri Edi Swasono Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari: *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>25</sup>

Menurut Dr. Fay Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>26</sup>

Menurut Sugimun, MD. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (badan Hukum) dengan jalan bekerja sama atas sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.<sup>27</sup>

Menurut Sri-Edi Swasono Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong royong dan kolektivan akan tumbuh subur didalam koperasi.

---

<sup>25</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi, Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 1

<sup>26</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997:19

<sup>27</sup> Sugimun, MD. *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Masagung Jakarta. 1920:2.

Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dan lebih menguat.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya berdasarkan asas perkoperasian, dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>29</sup>

Memperhatikan pendapat para pakar diatas, definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan Akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.<sup>30</sup>
- d. Bahwa dengan kerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- e. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai

---

<sup>28</sup> Sri-Edi Swasono, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI-Press Jakarta 1987:159.

<sup>29</sup> Abdul Basith, S.pd., M.Si, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN MALANG PRESS: Cetakan 1 2008, hal 42

<sup>30</sup> Ninik Widiyanti, dkk. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989:1

pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

- f. Mengandung unsur demokrasi
- g. Mengandung unsur sosial
- h. Mengandung unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Membangun tatanan perekonomian nasional.

## 3. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan

---

<sup>31</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, Op. Cit.* h. 20-2

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 4. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (International Corporative Alliance/ICA) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka
- b. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis

- c. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
- d. Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota
- e. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
- f. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat local, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara local, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang perkoperasian yakni dalam UU no 25 Tahun 1992 pasal 5 menjelaskan prinsip-prinsip Koperasi yakni :

- a. Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau

diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>32</sup>

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Didalam rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada ditangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.<sup>33</sup>

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian hasil sisa usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan kepada penimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume koperasi.<sup>34</sup> Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggotayang pasif.

d. Pemberian batas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong rasa kesetiakawanan

---

<sup>32</sup> Evinsond Baswi, *Kopeasi Indonesia*, Yogyakarta : BPEFE, 1997, hal. 50

<sup>33</sup> Sitioso Arifin dan Tamba Halomoa, *Koperasi Teori dan Paktik*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2001), 27-28.

<sup>34</sup> Revrinsond Baswir, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : BPEFE, 1999), 51

antar sesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antara anggota yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, tiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

e. Kemandirian

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia adalah meningkatkan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri koperasi harusnya mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam masyarakat. Koperasi juga harus bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## 5. Jenis-Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotannya koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Simpan Pinjam
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Pemasaran
- d. Koperasi Produsen

## 7. Organisasi Koperasi

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Berikut penjelasannya.

### a. Rapat anggota

Salah satu perangkat organisasi yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Melalui forum ini setiap anggota akan menggunakan hak suaranya berdasarkan prinsip “satu orang satu suara” dan tidak ada suara yang diwakilkan (no voting by proxy). Dengan forum rapat anggota inilah setiap anggota mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau dibubarkan. Sesuai dengan pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, Rapat Anggota mempunyai kekuasaan antara lain:

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi
- b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBKOP) serta pengesahan laporan keuangan

- e. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Sesuai dengan pasal 22 UU No. 25 tahun 1992, yang berhak hadir dalam koperasi diatur dalam anggaran dasar koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun buku yang lampau sekaligus membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk satu tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi, yang berhak hadir dalam rapat anggota koperasi yaitu:

- a. Anggota yang terdaftar dalam buku anggota
  - b. Pengurus, pengawas dan penasehat koperasi
  - c. Pejabat Kantor Dinas Koperasi dan pejabat pemerintah yang berhak hadir dalam rapat anggota sesuai dengan UU Perkoperasian
  - d. Para peninjau yang berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok diatas.
- b. Pengurus

Salah satu perangkat koperasi yang memperoleh

kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawannya atas persetujuan Rapat Anggota. Pasal 29 UU No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

1. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dan dari kalangan anggota
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
4. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun
5. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota pengurus ditentukan dalam anggaran dasar koperasi

#### c. Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi selain Rapat Anggota dan pengurus. Teguh Sihono menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus. Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi

atas penyimpangan yang terjadi. Pengawas dipilih oleh Rapat anggota dari kalangan anggota yang persyaratannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengawas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jika pengawas tidak mampu melaksanakan tugas pemeriksaan, koperasi dapat meminta bantuan jasa audit pada akuntan public untuk melakukan pemeriksaan terhadap usaha koperasi, khususnya dalam bidang keuangan.

## 7. Modal Koperasi

Permodalan koperasi di atur dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 41 adalah:

- a) Modal sendiri, yaitu modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai penanam modal yang dapat digunakan koperasi untuk melakukan usaha. Modal ini berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- b) Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya, serta sumber-sumber lain yang sah.

Menurut SAK ETAP modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan serta dapat diambil kembali apabila anggota

keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi koperasi merupakan simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Suryanti<sup>35</sup>, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan koperasi-koperasi yang ada di eks-Karesidenan Banyumas dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan koperasi di eks-Karesidenan Banyumas. Dari hasil analisis kualitatif penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan koperasi eks- Karesidenan Banyumas yaitu dalam Penyajian laporan keuangan koperasi primer di eks Karesidenan Banyumas sebagian besar belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

---

<sup>35</sup> Erma Suryanti, Irianing Suparlinah, I Wayan Mustika, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi di eks-Karisidenan Banyumas, *Jurnal Akuntabel*, Vol 5, No 2, Juni 2015: 87-104

ETAP). Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan koperasi primer di eks Karesidenan Banyumas diketahui dari 41 koperasi yang belum menyajikan Laporan Perubahan Modal, 41 koperasi yang belum menyajikan Laporan Arus Kas, dan 31 koperasi belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu memiliki variabel yang sama yaitu terkait penyajian laporan keuangan Koperasi sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 43 koperasi aktif primer di Banyumas sedangkan penelitian ini hanya mengambil satu sampel saja yaitu pada laporan keuangan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten Tulungagung.

Narsa<sup>36</sup>, tujuan pertama adalah untuk menelaah overload standar akuntansi dan mengetahui bagaimana latar belakang munculnya SAK ETAP. Tujuan kedua dari artikel ini adalah untuk mengungkapkan hasil riset yang dilakukan penulis terkait implementasi SAK ETAP pada koperasi di Jawa Timur serta juga menginvestigasi apakah terdapat perbedaan persepsi terkait SAK ETAP antara kelompok pelaku koperasi dengan kelompok akuntan pendidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini

---

<sup>36</sup> Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa, Isnalita, SAK-ETAP sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017 : 44 – 65

menunjukkan bahwa: (a) tingkat keterterapan SAK ETAP masuk pada kategori ‘diterapkan’ untuk prinsip pengungkapan dan penyajian. Untuk prinsip pengakuan dan pengukuran, meskipun hasilnya masuk pada kategori kurang diterapkan, hal itu lebih disebabkan karena banyak akun-akun khusus yang disyaratkan minimal ada di laporan keuangan oleh SAK ETAP, tidak terjadi pada kegiatan akuntansi Koperasi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini yaitu terkait dengan penyajian laporan keuangan pada Koperasi sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data nya menggunakan koesioner yang disebar kepada para responden yang terdiri dari dua kelompok yaitu pelaku koperasi (koperasi wanita usaha simpan pinjam) di Jawa Timur yang hadir pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan kedua adalah para akuntan pendidik yakni dosen akuntansi yang mengajar pada beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Kuesioner disebar secara random. Total kuesioner yang disebar adalah 150 buah, dengan rincian 50 buah kuesioner keterterapan dan 50 kuesioner persepsi (diberikan kepada 50 pelaku koperasi yang sama) serta 50 kuesioner persepsi untuk akuntan pendidik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sampel laporan keuangan Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten

Tulungagung.

Indawatika<sup>37</sup>, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan di Koperasi Intako yang sesuai dengan SAK ETAP dan untuk mengidentifikasi respon pihak eksternal mengenai penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK ETAP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Intako membuat tiga jenis laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi serta Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai laporan yang mempresentasikan kinerja operasional perusahaan. Dalam proses penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilakukan Koperasi Intako sudah sesuai dengan SAK ETAP, tetapi ada beberapa perbedaan nama pos tetapi mempunyai arti yang sama. Namun Koperasi Intako tidak menyusun dan menyajikan laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, hal ini dikarenakan terlalu rumit dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memberi kelonggaran kepada koperasi yaitu penyusunan laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Respon anggota Koperasi Intako mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

---

<sup>37</sup> Feri Indawatika, Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal, *Journal Of Accounting Science* Vol. 1 No. 1, Januari 2017:38-50

adalah belum mengetahui komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP dan kurang begitu paham dengan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Respon dari Diskoperindag dan ESDM Sidoarjo mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP adalah laporan yang disusun sudah sesuai SAK ETAP, tetapi mengenai jenis dan format laporan keuangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi selama masih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Respon dari Koperasi Waru Buana Putra mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP adalah terlalu rumit jika koperasi harus menyusun semua laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP karena penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dan undang-undang memberi kelonggaran mengenai penyusunan laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian.

Septariani<sup>38</sup>, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan SAK ETAP pada Koperasi Unit Desa Sriwijaya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya untuk Tahun 2013-2015 belum seutuhnya sesuai

---

<sup>38</sup> Septariani, J. Standar Penerapan Akuntansi Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Unit Desa, *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 14 No.1, Jan-Jun 2018: 64-83

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Hal ini dapat dilihat dari tidak dibuatnya Laporan Arus Kas, Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus di dalam rapat anggota tahunan (RAT), 2) penyajian laporan keuangannya juga masih terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan SAK-ETAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa, sedangkan penelitian yang saya laksanakan yaitu di Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten Tulungagung.

Sjaiful<sup>39</sup>, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan SAK ETAP menimbulkan perbedaan signifikan atas kinerja keuangan Koperasi Inti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Data kualitatif digunakan untuk mendukung atau memahami peristiwa di balik data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat likuiditas Koperasi Inti (Cash Ratio) sebelum penerapan SAK ETAP lebih baik dibandingkan setelah penerapan SAK ETAP. Hasil

---

<sup>39</sup> Sjaiful, RL. Analisis Perbandingan Tingkat Likuiditas Koperasi Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* , Vol. 5 No. 1, Maret 2019: 1283–1292

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus Koperasi INTI dalam menetapkan standar akuntansi yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu memiliki objek penelitian yang sama yaitu di Koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan metode penelitian saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Putra<sup>40</sup>, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan yang telah diterapkan oleh Koperasi dan merancang sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan eksperimen, sedangkan metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah waterfall. Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Netbeans IDE dengan bahasa pemrograman Java dan Mysql sebagai penyimpanan database serta iReport untuk mendesain laporan keuangan. Hasil yang didapatkan dari analisis dan perancangan yang dilakukan yaitu sebuah rancangan sistem informasi akuntansi yang mampu menunjang kebutuhan operasional Koperasi. Adapun keunggulan sistem yang dihasilkan yaitu adanya Bendahara yang secara khusus mengelola keuangan Koperasi sehingga proses pencatatan pelaporan keuangan berjalan efektif dan efisien yang telah

---

<sup>40</sup> Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, Muhamad Ardi Nupi Hasyim, Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Aktif di Jawa Barat Sebagai Acuan Pembuatan Aplikasi Akuntansi Koperasi Berbasis Android, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol XII, Nomor 1, Maret 2021, 65 - 78

dirancang sesuai dengan kebutuhan Koperasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada SAK ETAP di Koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Akuntansi dengan menggunakan aplikasi berbasis Androit untuk memudahkan Bendahara dalam melakukan penyajian laporan keuangan Koperasi.

Rohmah<sup>41</sup>, tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi SAK ETAP pada KPRI di wilayah Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap enam KPRI yang ada di kabupaten Purworejo tentang implementasi Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) ada beberapa kesimpulan yang bisa dikekukakan dalam laporan ini. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut: Implementasi SAK ETAP di wilayah Kabupaten Purworejo belum maksimal bahkan dari enam koperasi yang dijadikan sampel penelitian belum ada yang menerapkan SAK ETAP. Sosialisasi SAK ETAP belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini adalah Diskoperindagpar. Padahal pedoman tersebut sudah berlaku aktif sejak tahun 2011, sehingga pemerintah Kabupaten Purworejo dinilai lamban dalam menindaklanjuti pedoman tersebut. persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu

---

<sup>41</sup> Rohmah, Nur; Supriono, Analisis Implementasi SAK ETAP Pasca Pencabutan PSAK NO.27 pada KPRI di Kabupaten Purworejo, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, Maret 2017: 14-31

menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada laporan keuangan Koperasi yang sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada sampel penelitian. Penelitian saya berfokus pada satu koperasi saja, sedangkan penelitian ini menggunakan enam KPPRI yang ada di wilayah Purworejo.

Arsani<sup>42</sup>, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Duta Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan KSP Duta Sejahtera belum sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan, perlakuan akuntansi beban sudah sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan yaitu selisih hasil usaha menurut koperasi lebih rendah daripada selisih hasil usaha menurut perhitungan sesuai SAK ETAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada SAK ETAP di Koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pendapatan dan beban dalam SAK ETAP, sedangkan penelitian saya lebih keseluruhan pada laporan keuangan Koperasi Rapat Anggota Tahunan.

---

<sup>42</sup> Kadek Arsani, I Wayan Putra, Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 3 No. 3, 2013: 117-131

Ariyanti<sup>43</sup> tujuan penelitian untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP No. 15 pada Koperasi PT. Prisma Putra Textile Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis dari Koperasi Karyawan PT. Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada SAK ETAP dalam laporan keuangan Koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada SAK ETAP No. 15 yaitu tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, sedangkan penelitian saya lebih keseluruhan pada laporan keuangan Koperasi dalam rapat anggota tahunan.

Setiyanti<sup>44</sup> tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada Koperasi di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil

---

<sup>43</sup> Rizka Ariyanti, Sri Murniati, Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP No. 15 pada Koperasi PT. Prisma Putra Textile Pekalongan, *Jurnal Litbang* Vol. 16 No. , 2016: 49-57

<sup>44</sup> Warno, Sri Wiranti Setiyanti, Konsistensi Penerapan SAK ETAP pada Koperasi di Kota Semarang Tahun 2013, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 6, No.3, Oktober 2014:11-36

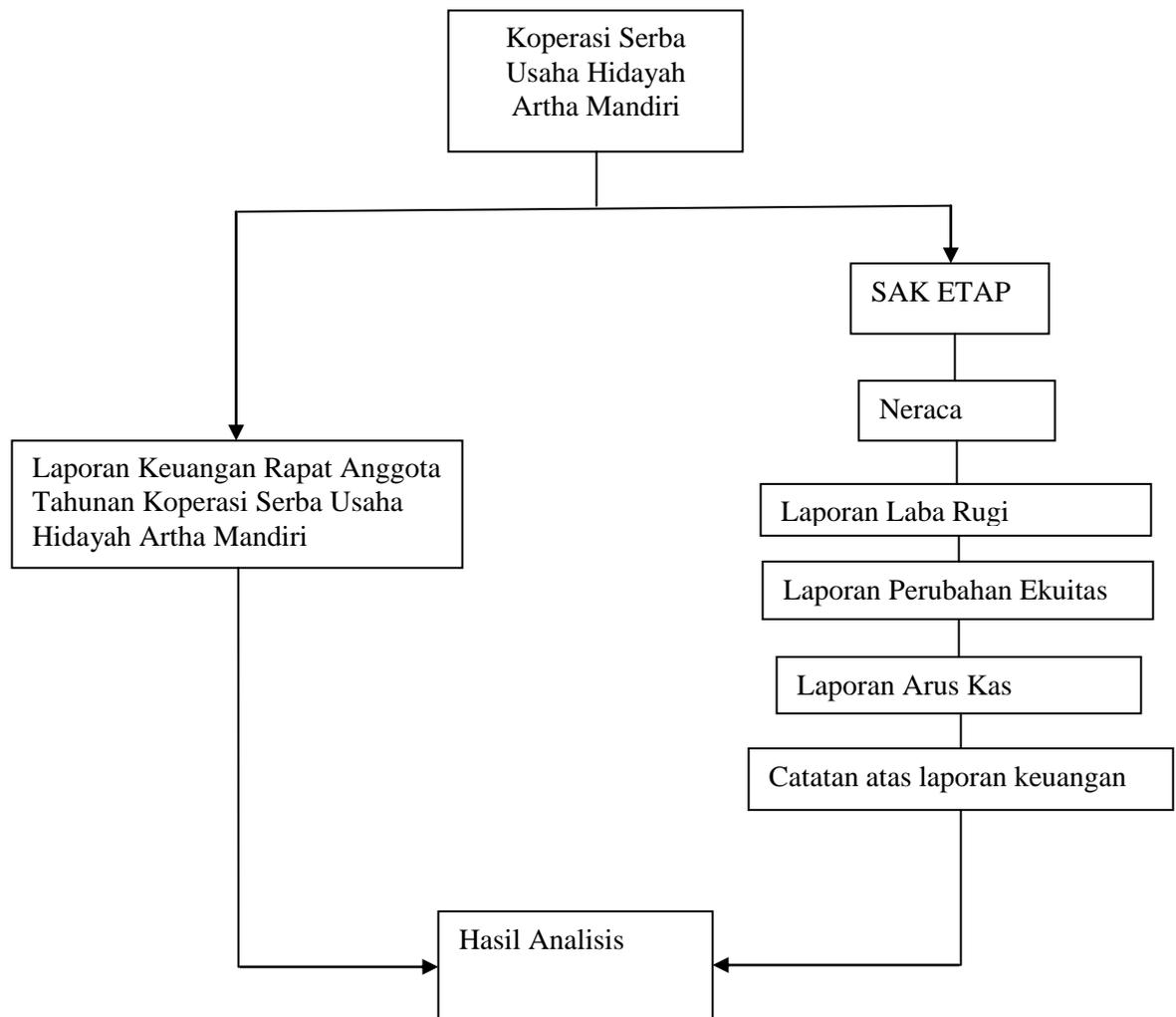
penelitian menunjukkan bahwa koperasi dikota Semarang sebanyak 33 koperasi yang dipakai untuk sampel penelitian sebagian kecil sudah menerapkan SAK ETAP, sedangkan sebagian besar menerapkan SAK ETAP tetapi belum keseluruhan ketentuan, koperasi yang belum sama sekali menerapkan SAK ETAP tidak ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini berfokus pada SAK ETAP dalam laporan keuangan Koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada koperasi yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

## G. Kerangka Berfikir

### Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2022.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas peneliti akan melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten

Tulungagung. Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten Tulungagung merupakan Koperasi Serba Usaha yang melayani simpan pinjam/ menyediakan modal pinjaman khusus anggota Koperasi tersebut. Dalam Rapat Anggota Tahunan sebuah koperasi biasanya menunjukkan laporan keuangan selama periode tertentu kepada anggotanya, sebagai laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota tahunan yang dilakukan setahun sekali. Untuk itu koperasi harus menunjukkan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah SAK ETAP yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan keuangan. Penelitian ini akan mencocokkan dan menganalisis Laporan Keuangan Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum agar bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya.